ABSTRAK

Diperbaharuinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan berdampak pada Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang serta Hambatan dan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi camat dalam kedudukan dan tugasnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hokum yang berlaku. Adapun spesifikasi dari penelitian ini adalah memberikan deskriptis analitis yaitu memberikan gambaran tentang Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat menurut UndangNomor 32 Tahun 2014 Dan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

Tugas Dan Kedudukan Camat menurut UndangNomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Akan tetapi terdapat beberapa hal mendasar yang membedakan dalam peraturan tersebut antara lain mengenai Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota sebagaimana tidak diatur dalam Undang-Undang yang lama / Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci :Camat, Tugas dan Wewenang, UU Nomor 23 Tahun 2014

ABSTRACT

Renewed Law No. 32 Year 2004 on Regional Government by Law Number 23 Year 2014concerning the Government affect the Difference Position and Duties Head According to Law No. 32 of 2004 and Law No. 23 Year 2014 About the Local Government in the District Bergas Semarang regency.

Issues raised in this study is the difference Position and Duties Head according to Law Number 32 Year 2004 and Law Number 23 Year 2014 About the Local Government in the District of Semarang District Bergas as well as barriers and overcoming obstacles encountered in the district head position and duties.

This study used a qualitative approach with normative juridical approach with descriptive analytical research specifications.
Normative juridical done by examining and interpreting matters relating theoretical principles, conceptions, doctrines and legal norms in force.The specifications of this study is to provide a descriptive analytical distinction that gives an overview of the Status and Tasks Head according to Law Number 32 Year 2014 and Law Number 23 Year 2014 About the Local Government in the District of Semarang District Bergas.

Tasks and Head Position by Law No. 32 of 2004 and Law No. 23 Year 2014 About the Local Government basically have similarities in performance of duties and authority.However, there are some basic things that set out in the regulation include the funding in the implementation of tasks of government by camat as referred to in Article 225 paragraph (1) letter b up to letter h as well as Article 226 paragraph (1) shall be charged on the district budget / as the city is not regulated under the old Law / Law Number 32 Year 2004 on Regional Government

Keywords: Head, Duties and Authorities, Law Number 23 Year 2014